

## PERAN PEMERINTAH DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA DOLONG A KECAMATAN WALEA KEPULAUAN KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Hamdan Lanonci<sup>1</sup>, Lisda Van Gobe<sup>2</sup>, Sofyan Alhadar<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Universitas Bina Taruna Gorontalo

[lnjhamdan@gmail.com](mailto:lnjhamdan@gmail.com), [lisdavangobel69@gmail.com](mailto:lisdavangobel69@gmail.com),  
[alhadsof21@gmail.com](mailto:alhadsof21@gmail.com)

Received: 08-07-2025

Revised: 18-08-2025

Approved: 28-08-2025

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Dolong A, Kecamatan Walea Kepulauan, Kabupaten Tojo Una-Una, dengan fokus pada aspek pemberdayaan masyarakat, motivasi, dan komunikasi. Latar belakang penelitian ini dilandasi oleh pentingnya kontribusi pemerintah desa dalam mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang partisipatif dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, dengan tujuan memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap pelaksanaan program dan dampaknya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah desa mencerminkan adanya inisiatif positif melalui pelatihan, bantuan alat, dan pendampingan kepada petani, nelayan, dan pelaku UMKM. Namun, implementasi prinsip partisipatif masih lemah, terlihat dari distribusi program yang belum merata serta minimnya pendampingan berkelanjutan. Selain itu, motivasi masyarakat belum tumbuh secara optimal karena kurangnya penghargaan dan stimulasi. Dalam aspek komunikasi, penyampaian informasi masih bersifat satu arah tanpa adanya dialog dua arah, sehingga menghambat partisipasi aktif masyarakat. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar pemerintah desa meningkatkan pelibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan program, memperkuat kapasitas pelaku usaha melalui pelatihan dan penghargaan berkelanjutan, serta membangun sistem komunikasi yang lebih inklusif dan dialogis guna menjamin keberlanjutan dan pemerataan manfaat program hingga ke wilayah pelosok.

Kata Kunci : Peran Pemerintah Desa, Kesejahteraan Masyarakat

### PENDAHULUAN

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah diukur dengan beberapa parameter. Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu bukti efektifitas pembangunan dengan dibuktikan beberapa indikator. Bagi suatu daerah, pengukuran kondisi dan kemajuan pembangunan daerah dapat dilakukan melalui penggunaan Indikator Pembangunan Daerah. Indikator ini pada dasarnya merupakan indikasi atau tanda-tanda umum tentang kondisi dan perkembangan dari sesuatu aspek pembangunan daerah. Indikator ini terdiri atas dua bagian yaitu Indikator Ekonomi Daerah dan Indikator kesejahteraan sosial.

Tabel 1.1

Berikut adalah jumlah penduduk di Desa Dolong A Kecamatan Walea Kepulauan, Kabupaten Tojo Una-Una tiga tahun terakhir

| No | Tahun | Jumlah laki-laki | Jumlah perempuan | Jumlah Total penduduk |
|----|-------|------------------|------------------|-----------------------|
| 1  | 2024  | 485              | 515              | 1.000                 |
| 2  | 2023  | 470              | 500              | 970                   |
| 3  | 2022  | 460              | 490              | 950                   |

Berdasarkan tabel di atas, jumlah penduduk Desa Dolong A, Kecamatan Walea Kepulauan, Kabupaten Tojo Una-Una dalam tiga tahun terakhir menunjukkan tren

peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2022 jumlah penduduk tercatat sebanyak 950 jiwa, yang terdiri dari 460 laki-laki dan 490 perempuan. Kemudian pada tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 970 jiwa dengan 470 laki-laki dan 500 perempuan. Tren ini terus berlanjut pada tahun 2024 dengan total penduduk sebanyak 1.000 jiwa, terdiri dari 485 laki-laki dan 515 perempuan. Secara keseluruhan, jumlah penduduk selama tiga tahun terakhir mencapai total 2.920 jiwa, yang menggambarkan pertumbuhan penduduk yang stabil di desa tersebut.

Peran pemerintah dalam mengalokasikan dana desa untuk penurunan kemiskinan sangat penting, contohnya dalam membangun infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat, pemerintah harus memprioritaskan tenaga kerja dari masyarakat sendiri sehingga masyarakat bisa mendapatkan pendapatan, dan juga harus ada pemerataan dalam menyalurkan pekerja-pekerja dalam pembangunan desa. Sehingga dana desa ini bisa bermanfaat dalam penurunan angka kemiskinan.

**Tabel 1.2**

**Jumlah Penduduk Miskin yang Menerima dan Tidak Menerima Bantuan Sosial di Desa Dolong A (2022–2024)**

| No | Tahun | Jumlah Penduduk Miskin | Menerima Bantuan Sosial | Tidak Menerima Bantuan | Presentasi Penerima (%) | Presentasi Tidak Menerima (%) |
|----|-------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 1  | 2024  | 150                    | 130                     | 20                     | 86,7%                   | 13,3%                         |
| 2  | 2023  | 165                    | 120                     | 45                     | 72,7%                   | 27,3%                         |
| 3  | 2022  | 180                    | 110                     | 70                     | 61,1%                   | 38,9%                         |

Berdasarkan data jumlah penduduk miskin di Desa Dolong A dari tahun 2022 hingga 2024, terlihat adanya tren penurunan yang signifikan. Pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 180 orang, menurun menjadi 165 orang pada tahun 2023, dan kembali menurun menjadi 150 orang pada tahun 2024. Seiring dengan penurunan jumlah penduduk miskin, terdapat peningkatan dalam cakupan bantuan sosial yang diterima oleh masyarakat. Pada tahun 2022, sebanyak 110 orang (61,1%) dari penduduk miskin menerima bantuan sosial, meningkat menjadi 120 orang (72,7%) pada tahun 2023, dan terus meningkat hingga 130 orang (86,7%) pada tahun 2024. Sebaliknya, jumlah penduduk miskin yang tidak menerima bantuan menurun dari 70 orang (38,9%) di tahun 2022 menjadi hanya 20 orang (13,3%) di tahun 2024. Hal ini menunjukkan perbaikan dalam mekanisme pendataan dan distribusi bantuan sosial, serta menjadi indikator keberhasilan pemerintah desa dalam menjangkau masyarakat miskin secara lebih merata.

Adapun observasi yang dilakukan oleh peneliti, terlihat bahwa yang menjadi permasalahan utama dalam peran pemerintah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat masih menghadapi beberapa kendala. Pertama, pemerintah desa dinilai kurang optimal dalam memberdayakan masyarakat melalui program-program keterampilan, pelatihan usaha, maupun penguatan ekonomi lokal yang seharusnya menjadi pondasi kesejahteraan. Misalnya, pada tahun 2022, pemerintah desa mengalokasikan dana untuk pelatihan pengolahan produk pertanian lokal seperti kelapa dan jagung. Namun, pelatihan tersebut hanya dihadiri oleh sebagian kecil penduduk dan tidak dilanjutkan ke tahap pendampingan bisnis. Akibatnya, keterampilan yang diperoleh tidak dimanfaatkan secara maksimal, dan penduduk tetap bergantung pada mata pencaharian tradisional dengan pendapatan yang relatif rendah. Kedua, dorongan atau motivasi yang diberikan kepada masyarakat untuk aktif dalam

kegiatan pemberdayaan juga masih rendah, sehingga partisipasi masyarakat dalam program pembangunan belum maksimal. Ketiga, pemerintah desa juga masih minim dalam hal sosialisasi atau komunikasi dua arah dengan masyarakat, baik melalui dialog terbuka, forum musyawarah, maupun penyebaran informasi terkait peluang peningkatan kesejahteraan.

Penelitian terdahulu adalah suatu penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dan yang menyangkut tentang peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, adapun judul yang dibahas tentang peran pemerintah yang diteliti oleh peneliti terdahulu adalah:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

| No | Judul Penelitian                                                                                                                                                                     | Metode Penelitian                                  | Fokus Indikator                                                                                                                  | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Juan (2022)<br>"Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Mawea Kecamatan Tobelo Timur Kabupaten Halmahera Utara"                                    | Jenis penelitian deskriptif pendekatan kualitatif. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peran</li> <li>• Pemerintah desa</li> <li>• Kesejahteraan Masyarakat</li> </ul>         | Temuan penelitian bahwa peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dalam menyediakan dan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang cepat, tepat, akurat, dan berkualitas. Peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat peran menetapkan dan merelisasikan program-program pembangunan yang sesuai kebutuhan masyarakat; peran membina dan meningkatkan perekonomian desa; peran memperjuangkan aspirasi pembangunan dari masyarakat kepada pemerintah; dan peran mendukung pelaksanaan program-program pembangunan di desa yang dilaksanakan oleh pemerintah. Peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peran perlindungan masyarakat dilihat dari peran dalam membina kehidupan masyarakat desa, dan peran membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa. |
| 2. | Nartin & Musin, (2022)<br>"Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dimasa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Kantor Camat Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan)" | Jenis penelitian deskriptif pendekatan kualitatif. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah Daerah,</li> <li>• Kesejahteraan Masyarakat,</li> <li>• Covid-19.</li> </ul> | Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimasa pandemi covid-19 studi pada kantor kecamatan tinanggea kabupaten konawe selatan dengan menggunakan indikator 1.) Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator yaitu: belum berjalan dengan semestinya, hal ini dapat dilihat dari segi pembagian bantuan yang tidak disamaratakan oleh masyarakat. 2.) Peran Pemerintah Sebagai Regulator yaitu: pihak pemerintah sudah memberikan arahan dan telah membuat kebijakan kepada masyarakat akan tetapi pada akhirnya masyarakat belum maksimal dalam mematuhi peraturan tersebut. 3.) peran pemerintah sebagai Katalisator                                                                                                                                         |

|    |                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                |                                                                                                               | yaitu: Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai peran pemerintah sebagai katalisator, dilihat dari program pemerintah dalam melakukan sosialisasi dan melakukan pengawasan serta evaluasi mengenai covid-19 telah menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3. | Sadid Helni, (2013)<br><br>"Peranan Pemerintah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Wasuponda Kabupaten Luwu Timur" | Jenis penelitian deskriptif pendekatan kualitatif.<br><br>• Peningkatan kesejahteraan masyarakat<br>• program | Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa Wasuponda Kabupaten Luwu timur cukup namun masih ada beberapa kekurangan dalam pelaksanaan program yang dicanangkan pemerintah masih sulit untuk direalisasikan. program – program yang di realisasikan oleh pemerintah merupakan bantuan baik berupa dana dari pemerintah kerja sama antara pemerintah desa, dan pemerintah kecamatan serta pemerintah daerah kabupaten, selain itu bantuan lain yang di dapatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti dana untuk menjalankan usaha yang juga diberikan oleh beberapa LSM seperti PNPM Mandiri, BKKBN, dan juga dan Comdev dari Development PT.Vale, Tbk, serta bantuan dari Gapoktan yang ditujukan khusus bagi para petani dan juga peternak, untuk peningkatan hasil pertanian masyarakat desa Wasuponda. |

Berdasarkan *Mepping* penelitian-penelitian di atas dapat ditarik persamaan dan perbedaan dari penelitian-penelitian di atas, persamaannya adalah ketiga penelitian di atas menggunakan metode penelitian yang sama, Serta perbedaannya terletak pada tempat yang berbeda dan fokus yang berbeda. Dan kemudian, penelitian ini menjadi menarik dengan membuktikan bahwa belum ada penelitian yang mengkaji tentang Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Dolong A, Kecamatan Walea Kepulauan Kabupaten Tojo Una-Una.

### **Konsep Peran Pemerintah**

Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidup. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal yang dikemukakan oleh (Herminingsih et al., 2022) yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat dalam organisasi.

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

(Mince, 2021) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status social khusus.

Pendapat (Cahyaningtyas, 2022) bahwa dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Peranan didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan social tertentu. Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan yang lain.

Sedangkan menurut (Ilham, 2018) Pengertian desa dari sudut pandang sosial budaya dapat diartikan sebagai komunitas dalam kesatuan geografis 20 tertentu dan antar mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif homogen dan banyak bergantung secara langsung dengan alam. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa (Sugiman, 2018).

Alfianto & Fauzi, (2021) mengatakan bahwa Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari Sekretaris Desa, pelaksana teknis lapangan, unsur kewilayahan dan perangkat desa lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, dan sekretaris desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi syarat.

### **Konsep Organisasi Pemerintahan**

Definisi organisasi adalah sebuah sistem kegiatankegiatan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama kearah suatu tujuan bersama di bawah sebuah kewenangan dan kepemimpinan (Husin, 2020; Tanjung et al., 2022)

Menurut Jaelani & Sabarudin (2021) Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk suatu tujuan bersama dan terikat secara formal dalam persekutuan, dimana selalu terdapat hubungan antara seorang atau sekelompok orang-orang yang disebut pimpinan dan seorang atau sekelompok orang lain yang disebut bawahan.

Pengertian organisasi merupakan sekumpulan orang-orang yang disusun dalam kelompok-kelompok, yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama, Organisasi adalah system kerjasama antara dua orang atau lebih, atau organisasi adalah setiap bentuk kerjasama untuk pencapaian tujuan bersama, organisasi adalah struktur pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerjasama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu (Ilwan & Mesiono 2022).

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan memelihara keamanan dan memelihara derajat kehidupan rakyat serta menjamin kepentingan negara itu sendiri. Dan mempunyai fungsi Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga eksekutif untuk mencapai tujuan negara (Kurniawan, 2017; Apriansyah, 2016)

pemerintahan adalah semua kegiatan lembaga atau badan-badan publik tersebut dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara.

### **Konsep Kesejahteraan Masyarakat**

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, baik kita suka ataupun tidak, hampir semua yang kita lakukan dalam kehidupan kita berhubungan serta berkaitan dengan orang lain yang ada di sekitar kita, kondisi sejahtera (well-being), biasanya menunjuk pada istilah kesejahteraan sosial (social welfare) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material.

Dalam membahas kesejahteraan, tentu harus diketahui dahulu tentang pengertian kesejahteraan. Menurut (Hidayati & Fadhilah, 2021) Sejahtera adalah 'aman, sentosa, dan makmur'. Sehingga arti kesejahteraan itu meliputi kemandirian, keselamatan dan kemakmuran.

Kesejahteraan atau yang biasa disebut kesejahteraan sosial merupakan serangkaian aktifitas yang terorganisir yang ditunjukan untuk meningkatkan kualitas hidup, relasi sosial, serta peningkatan kehidupan masyarakat yang selaras dengan standard dan norma-norma masyarakat sebagai tujuan merupakan cita-cita, pedoman dan aspirasi agar terpenuhinya kebutuhan materi, sosial dan spiritual (Roza et al., 2019).

(Purwowibowo & Hendijanto 2019) kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi yang harus memenuhi 3 syarat utama: ketika masalah sosial dapat dimenej dengan baik, ketika kebutuhan terpenuhi, ketika peluang-peluang sosial terbuka secara maksimal.

Menurut Kolle dan Bintarto dalam (Lusya et al., 2021) , kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan:

- a) Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya;
- b) Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya;
- c) Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya;
- d) Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.

Berikut pendapat dari (Kamerman et al, 2006:79) menjelaskan 6 komponen atau subsistem dan kesejahteraan sosial, yang dikembangkan kembali oleh (Lamber et al, 2022) yaitu:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pemeliharaan Penghasilan
4. Pelayanan Kerja
5. Perumahan
6. Pelayanan Sosial Personal

Menurut (Sholahudin, 2020) Masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan sama atau menyatu satu sama lain karena mereka saling berbagi identitas, kepentingan-kepentingan yang sama, perasaan memiliki, dan biasanya satu tempat yang sama menurut kodratnya

Menurut Mayangsari, (2017) masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama dalam waktu yang relatif lama dan mampu membuat

keteraturan dalam kehidupan bersama dan mereka menganggap sebagai satu kesatuan sosial.

Menurut (Simanjuntak, 2016) memberi pengertian bahwa masyarakat ialah kesatuan yang selalu berubah, yang hidup karena proses masyarakat yang menyebabkan terjadi proses perubahan itu.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskripsi dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskripsi oleh (Rahmi et al., 2023) dalam bukunya yang berjudul metodologi penelitian adalah menggambarkan berbagai fenomena informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian secara menyeluruh, secara faktual dan akurat sebagaimana adanya.

### **Sumber Data**

Sumber utama data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kata-kata dan perbuatan; data tambahan, seperti dokumen, digunakan dalam kasus lain. Oleh karena itu, dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yang dikemukakan oleh (Nilamsari, 2014) yaitu :

1. Data primer, diperoleh melalui wawancara mendalam, informan yang di pilih yaitu Kepala Desa 1 Orang Sebagai Informan Kunci, Sekertaris 1 Orang, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) 1 Orang, Tokoh Masyarakat 1 Orang, Ketua Karang Taruna Desa 1 Orang, Dan Masyarakat 2 Orang, Adapun Jumlah Informan Dalam Penelitian Ini Sebanyak 7 Orang
2. Data sekunder adalah pengumpulan data yang di lakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam proses pengumpulan data, di gunakan beberapa teknik dari dikemukakan oleh (Nafisatur, 2024) antara lain: Observasi, Wawancara, Dokumentasi

### **Teknik Analisis Data**

Dalam kaitan itu maka penelitian ini akan memfokuskan pada pertanyaan-pertanyaan dan pernyataan- pernyataan yang diberikan baik secara tertulis maupun secara lisan yang berkaitan dengan focus penelitian yang di ajukan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

### **Deskripsi Hasil Penelitian**

Matlamat atau tujuan yang ingin dicapai dalam melaksanakan penelitian ini yaitu untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang Peran Pemerintah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Dolong A Kecamatan Walea Kepulauan Kabupaten Tojo Una-Una yang dilihat dari tiga fokus yakni; Pemberdayaan masyarakat, Motivasi, dan Komunikasi. Data yang dikumpulkan melalui Observasi dan wawancara mendalam menggunakan pedoman wawancara, dianalisis secara deksriptif kualitatif sebagai berikut.

### **Pemberdayaan Masyarakat**

Berikut hasil wawancara tanggal 14 Juni 2025 dengan informan kunci (ASS) selaku kepala desa, mengatakan bahwa :

*"Memang pemerintah desa sudah berupaya semaksimal mungkin untuk melibatkan masyarakat dalam setiap program yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan. Namun, ada beberapa kendala yang saya hadapi itu cukup beragam.*

*Salah satu yang paling utama adalah keterbatasan sumber daya manusia, baik dari sisi aparatur desa maupun masyarakat itu sendiri. Banyak potensi lokal yang sebenarnya bisa dikembangkan, seperti hasil laut dan kerajinan, tetapi belum maksimal karena kurangnya pelatihan dan modal usaha. Selain itu, akses terhadap pasar juga masih terbatas karena kondisi geografis kepulauan, sehingga sulit menjangkau pembeli di luar desa. Kami dari pemerintah desa sebenarnya ingin mendorong lebih banyak program pemberdayaan, tapi terbentur juga pada keterbatasan anggaran dan sarana pendukung lainnya”.*

Berdasarkan hasil wawancara bersama informan kunci diatas dapat disimpulkan bahwa usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terus dilakukan, namun masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam aspek kapasitas SDM, keterbatasan anggaran, sarana, dan akses pasar. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak eksternal (seperti pemerintah kabupaten, LSM, maupun sektor swasta) sangat dibutuhkan agar program-program pemberdayaan dapat terlaksana secara optimal dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, kemudian peneliti mendalami informan dengan hasil wawancara pada tanggal 14 Juni 2025 dengan informan (FSS) selaku Sekertaris Desa, mengatakan bahwa:

*“Selama ini, kami di pemerintah desa berusaha melibatkan masyarakat secara aktif dalam berbagai program kesejahteraan. Setiap kali ada perencanaan program baik itu pembangunan infrastruktur, bantuan sosial, pelatihan keterampilan, maupun pengembangan ekonomi lokal kami selalu mengundang warga melalui musyawarah desa (musdes). Dalam musyawarah tersebut, masyarakat bisa menyampaikan usulan, kebutuhan, dan pendapatnya. Kami juga membentuk kelompok-kelompok seperti kelompok tani, kelompok nelayan, dan UMKM untuk menyalurkan bantuan dan pelatihan. Kendala utamanya adalah keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Potensi lokal seperti pertanian, perikanan, dan kerajinan sebenarnya cukup besar, tapi belum bisa dikembangkan secara maksimal karena dana desa terbatas dan belum ada pelatihan yang benar-benar berkelanjutan. Selain itu, masih ada sebagian masyarakat yang kurang aktif atau kurang memahami pentingnya program pemberdayaan”.*

Berdasarkan hasil wawancara Bersama informan pendukung diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa sudah berusaha membuka ruang partisipasi dan memberdayakan masyarakat melalui berbagai program, namun implementasinya masih menghadapi kendala serius, baik dari sisi keterbatasan internal desa (anggaran dan SDM) maupun minimnya partisipasi aktif masyarakat. Untuk itu, ke depan diperlukan strategi yang lebih terarah, seperti penguatan kapasitas aparatur, peningkatan kualitas pelatihan, dan pendekatan komunikasi yang lebih intensif kepada warga.

Berdasarkan dengan pendapat diatas berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, informan lainnya memberikan pendapatnya pada hasil wawancara tanggal 14 Juni 2025 dengan informan pendukung (AH) selaku Ketua BPD, mengutarakan bahwa :

*“Pemerintah desa selama ini sudah berusaha melibatkan masyarakat, khususnya dalam musyawarah desa untuk menyusun program-program pembangunan dan pemberdayaan. Misalnya, dalam program ketahanan pangan, pelatihan keterampilan, dan bantuan langsung tunai. Tapi memang tingkat partisipasinya masih perlu ditingkatkan, karena belum semua warga merasa memiliki peran atau memahami pentingnya keterlibatan mereka. Kendala utamanya ada pada dua hal:*

*pertama, keterbatasan sumber daya manusia dan kemampuan aparatur desa dalam menggali dan mengelola potensi lokal. Kedua, masih kurangnya data dan informasi yang akurat tentang potensi desa, misalnya di sektor perikanan atau pertanian”.*

Berdasarkan hasil wawancara Bersama informan pendukung diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah desa sebenarnya sudah berusaha untuk melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan, terutama melalui forum musyawarah desa. Dalam musyawarah itu, masyarakat diajak untuk ikut menyusun dan merencanakan berbagai program seperti ketahanan pangan, pelatihan keterampilan, maupun bantuan langsung tunai. Namun, pada tingkat partisipasi masyarakat masih belum maksimal. Masih banyak warga yang belum merasa ikut memiliki atau memahami pentingnya peran serta mereka dalam proses pembangunan desa.

Hasil wawancara tanggal 14 juni 2025 dengan informan pendukung (ML) selaku Tokoh Masyarakat setempat menguraikan bahwa:

*“Kalau menurut saya, pemerintah desa sudah berupaya melibatkan masyarakat, terutama lewat musyawarah desa saat perencanaan kegiatan. Tapi sayangnya, belum semua warga terlibat aktif, karena sebagian merasa belum terlalu paham atau kurang diberi informasi sebelumnya. Jadi, meskipun niatnya ada dari pemerintah desa, masih perlu peningkatan komunikasi dan pendekatan supaya masyarakat benar-benar merasa dilibatkan. Kendala paling utama menurut saya adalah keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Banyak perangkat desa belum memiliki pelatihan yang cukup untuk menggali dan mengelola potensi lokal seperti pertanian, perikanan, atau kerajinan. Selain itu, anggaran desa yang ada lebih banyak terserap untuk infrastruktur dasar, sementara untuk program pemberdayaan masyarakat masih terbatas. Belum lagi soal minimnya akses pasar dan pendampingan usaha yang membuat potensi lokal tidak berkembang maksimal”.*

Berdasarkan hasil wawancara Bersama informan pendukung diatas dapat disimpulkan bahwa meskipun pemerintah desa telah berupaya melibatkan masyarakat dalam perencanaan program melalui musyawarah desa, partisipasi warga masih belum optimal karena kurangnya pemahaman dan informasi yang diterima. Ia menilai bahwa komunikasi dan pendekatan pemerintah desa perlu ditingkatkan agar masyarakat merasa benar-benar dilibatkan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang belum terlatih dan minimnya anggaran menjadi kendala utama, terutama dalam pengelolaan potensi lokal seperti pertanian, perikanan, dan kerajinan. Anggaran desa yang lebih banyak digunakan untuk infrastruktur dasar membuat program pemberdayaan masyarakat kurang mendapat perhatian, ditambah lagi dengan terbatasnya akses pasar dan pendampingan usaha yang menghambat perkembangan potensi lokal secara maksimal.

Hasil wawancara tanggal 14 juni 2025 dengan informan pendukung (ARS) selaku Ketua Karang Taruna setempat menguraikan bahwa :

*“Sebenarnya cukup terbuka sih pemerintah desa dalam melibatkan masyarakat, terutama melalui musyawarah desa atau rapat-rapat perencanaan. Masyarakat, termasuk Karang Taruna, biasanya diundang untuk memberikan masukan terkait program pemberdayaan seperti pelatihan keterampilan, bantuan usaha kecil, atau kegiatan pemuda. Tapi partisipasinya belum maksimal karena masih banyak warga yang merasa belum paham program apa yang sedang dijalankan, dan ada juga yang kurang percaya karena hasilnya belum dirasakan langsung. Kendala utamanya menurut saya ada pada kurangnya informasi dan pendampingan. Banyak*

*warga punya potensi, misalnya di pertanian, kerajinan tangan, atau wisata, tapi tidak tahu bagaimana mengelolanya jadi usaha yang menghasilkan. Pemerintah desa sudah mencoba memfasilitasi, tapi terbatas juga karena anggaran yang kecil dan kurangnya tenaga pendamping atau pelatihan yang berkelanjutan. Kadang juga program yang datang itu sifatnya hanya jangka pendek”.*

Berdasarkan hasil wawancara Bersama informan pendukung diatas dapat disimpulkan bahwa meskipun pemerintah desa cukup terbuka dalam melibatkan masyarakat melalui musyawarah desa dan rapat perencanaan, partisipasi warga termasuk Karang Taruna masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program-program yang dijalankan serta minimnya kepercayaan karena hasil program belum dirasakan secara langsung. Kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya informasi, pendampingan, dan pelatihan berkelanjutan, padahal warga memiliki potensi di bidang pertanian, kerajinan, maupun pariwisata. Upaya fasilitasi dari pemerintah desa juga terbatas akibat minimnya anggaran dan sumber daya, ditambah lagi banyak program yang bersifat jangka pendek sehingga kurang memberikan dampak yang berkelanjutan.

Hasil wawancara tanggal 14 juni 2025 dengan informan pendukung (Y) selaku Masyarakat setempat menguraikan bahwa :

*“Kalau saya melihat bahwa pemerintah desa sudah berusaha melibatkan masyarakat, misalnya lewat kegiatan musyawarah desa (musdes), pelatihan keterampilan, dan program bantuan usaha kecil. Tapi sayangnya belum semua warga benar-benar ikut terlibat, karena kurangnya sosialisasi dan tidak semua program disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Kadang juga masyarakat belum percaya diri untuk terlibat aktif, apalagi yang belum pernah ikut pelatihan atau punya pengalaman. Kalau menurut saya sih, ada kendala utamanya ada pada sumber daya manusia dan anggaran. Masih sedikit aparat desa yang benar-benar memahami bagaimana menggali potensi lokal, seperti hasil laut atau kerajinan masyarakat. Selain itu, anggaran desa sering kali terbatas atau fokus pada pembangunan fisik, jadi program pemberdayaan seperti pelatihan, pendampingan usaha, atau pemasaran produk lokal masih kurang. Kadang juga masyarakat belum sepenuhnya sadar akan potensi yang mereka miliki, jadi butuh pendampingan yang berkelanjutan”.*

Berdasarkan hasil wawancara Bersama informan pendukung diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa sebenarnya telah berupaya melibatkan warga melalui musyawarah desa, pelatihan, dan program bantuan usaha kecil, namun partisipasi masyarakat belum maksimal karena kurangnya sosialisasi dan ketidaksesuaian program dengan kebutuhan nyata. Banyak warga juga merasa kurang percaya diri untuk terlibat, terutama yang belum memiliki pengalaman atau pelatihan. Kendala utama dinilai terletak pada keterbatasan sumber daya manusia, di mana aparat desa belum sepenuhnya mampu menggali potensi lokal seperti hasil laut dan kerajinan, serta pada keterbatasan anggaran yang lebih banyak diarahkan pada pembangunan fisik daripada pemberdayaan masyarakat. Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap potensi yang dimiliki masih rendah, sehingga mereka membutuhkan pendampingan berkelanjutan agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa.

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan diatas, maka peneliti dapata menarik kesimpulan bahwa upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat telah dilakukan oleh pemerintah desa melalui berbagai program dan forum partisipatif seperti musyawarah desa. Pemerintah desa telah berusaha melibatkan masyarakat

dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, baik yang bersifat ekonomi, sosial, maupun infrastruktur. Namun, pelaksanaan dari program-program tersebut masih menghadapi berbagai kendala yang cukup serius.

Secara umum, tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur desa, rendahnya partisipasi aktif masyarakat, serta minimnya anggaran yang lebih banyak dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dasar dibandingkan dengan program pemberdayaan. Selain itu, akses terhadap pasar, pelatihan yang berkelanjutan, serta pendampingan usaha juga masih sangat terbatas. Kondisi ini menyebabkan potensi lokal seperti pertanian, perikanan, kerajinan, dan pariwisata belum dapat dikembangkan secara optimal. Kurangnya sosialisasi dan komunikasi yang intensif dari pemerintah desa kepada masyarakat turut berkontribusi terhadap rendahnya partisipasi dan pemahaman warga terhadap program-program yang dirancang. Banyak warga yang belum merasa memiliki program tersebut, bahkan sebagian mengaku tidak percaya diri untuk terlibat karena belum memiliki pengetahuan atau pengalaman yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan yang telah dijalankan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan nyata masyarakat.

### **Motivasi**

Berikut hasil wawancara tanggal 14 juni 2025 dengan informan kunci (ASS) selaku kepala desa, mengatakan bahwa :

*"Saya sebagai Kepala Desa Dolong A, sudah berusaha dalam memberikan dukungan baik secara moral maupun material kepada masyarakat. Namun demikian, pada kenyataan di lapangan terlihat bahwa sebagian besar masyarakat masih belum paham bagaimana bentuk motivasi dan dorongan yang telah diberikan pemerintah desa. Kemudian, bukan hanya itu saja. Banyak warga yang merasa belum pernah mendapatkan motivasi atau perhatian, padahal kegiatan tersebut sudah dilaksanakan. Sehingga, Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap tujuan program, minimnya partisipasi dalam forum desa, serta adanya anggapan bahwa motivasi hanya sebatas pemberian bantuan uang atau modal secara langsung. Terakhir persoalan ketidaktahuan masyarakat ini akhirnya menimbulkan kesan seolah-olah pemerintah desa tidak pernah memberikan motivasi sama sekali".*

Berdasarkan hasil wawancara bersama informan kunci diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa sudah menjalankan berbagai program motivasi dan pemberdayaan, namun hasilnya belum dirasakan secara nyata oleh sebagian besar masyarakat. Hal ini bukan karena tidak adanya usaha dari pemerintah desa, melainkan karena adanya kesenjangan pemahaman dan komunikasi antara pihak desa dan warga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, kemudian peneliti mendalami informan dengan hasil wawancara pada tanggal 14 juni 2025 dengan informan (FSS) selaku Sekertaris Desa, mengatakan bahwa:

*"Sebetulnya, dari pemerintah desa kami sudah banyak melakukan upaya untuk mendukung masyarakat, baik dari sisi moral maupun material. Kami rutin adakan penyuluhan dan pembinaan, misalnya di bidang pertanian, perikanan, sama UMKM. Bahkan, kami juga sering buat pertemuan atau diskusi kelompok supaya masyarakat merasa dilibatkan. Dari sisi bantuan, kami sudah salurkan BLT, bantuan bibit, alat pertanian dan perikanan, dan pelatihan-pelatihan yang dibiayai dari Dana Desa. Tapi yang jadi kendala sekarang itu, masih banyak masyarakat yang kurang termotivasi untuk hadir atau ikut terlibat dalam kegiatan yang kami*

*adakan. Kadang kami sudah umumkan dan undang secara resmi, tapi yang datang sedikit. Kebanyakan warga maunya bantuan yang langsung kelihatan, seperti modal usaha dalam bentuk hibah atau pinjaman tanpa bunga. Padahal, kami ingin mereka ikut dari awal, belajar, dan ikut dibina. Nah, karena kurangnya pemahaman tentang pentingnya proses itu, jadi kesannya program kami nggak berjalan maksimal. Padahal semua ini tujuannya untuk membantu mereka lebih mandiri ke depannya”.*

Berdasarkan hasil wawancara Bersama informan pendukung diatas dapat disimpulkan bahwa adanya kesenjangan antara upaya pemerintah desa dalam memberikan motivasi dan dukungan kepada masyarakat dengan respon dan partisipasi masyarakat itu sendiri. Meskipun pemerintah desa sudah melaksanakan berbagai program pendukung baik berupa penyuluhan, pelatihan, hingga bantuan langsung masyarakat masih menunjukkan tingkat keterlibatan yang rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa masalah utama bukan pada kurangnya program, melainkan pada kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tujuan dan manfaat jangka panjang dari program tersebut. Banyak warga lebih memilih bentuk bantuan yang bersifat langsung dan instan, seperti modal usaha, dibandingkan terlibat dalam proses pembinaan yang sebenarnya dirancang untuk mendorong kemandirian. Situasi ini menunjukkan bahwa strategi motivasi yang digunakan oleh pemerintah desa belum sepenuhnya efektif dalam membangun kesadaran dan komitmen masyarakat, sehingga partisipasi aktif yang menjadi kunci keberhasilan program pemberdayaan belum tercapai secara optimal.

Senada dengan pendapat diatas berkaitan dengan motivasi, informan lainnya memberikan pendapatnya pada hasil wawancara tanggal 14 juni 2025 dengan informan pendukung (AH) selaku Ketua BPD, mengutarakan bahwa :

*“Kalau menurut saya, pemerintah desa Dolong A selama ini cukup aktif ya dalam memberikan dukungan ke masyarakat, baik itu secara moral maupun material. Dukungan moral itu biasanya berupa penyuluhan, sosialisasi program-program desa, terus juga ada pembinaan untuk kelompok usaha dan kelompok tani. Sementara dukungan material bisa kita lihat dari bantuan alat pertanian, bibit, program UMKM, sampai program padat karya yang bisa bantu masyarakat dapat penghasilan tambahan. Tapi memang, dari yang kami amati di BPD, masih ada warga yang merasa belum terlalu merasakan langsung manfaat dari program-program itu. Jadi, memang perlu ada pemerataan dan peningkatan efektivitas dalam penyalurannya. Masyarakat sekarang ini sangat berharap ada insentif yang lebih nyata dan berkelanjutan, misalnya pelatihan usaha tapi yang disertai pendampingan langsung, atau bantuan modal usaha bergulir yang tanpa bunga. Terus, mereka juga berharap ada dukungan dalam hal pemasaran produk lokal. Selain itu, warga juga akan lebih semangat kalau usaha mereka diapresiasi atau diberi penghargaan sama pemerintah desa. Jadi bukan cuma bantuan uang atau barang, tapi juga pembinaan yang terus-menerus dan akses pasar yang lebih luas”.*

Berdasarkan hasil wawancara Bersama informan pendukung diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Dolong A selama ini telah cukup aktif memberikan dukungan kepada masyarakat, baik secara moral maupun material. Dukungan moral diberikan melalui kegiatan penyuluhan, sosialisasi program desa, serta pembinaan kelompok usaha dan pertanian. Sementara itu, dukungan material diwujudkan melalui pemberian bantuan alat pertanian, bibit, bantuan untuk pelaku UMKM, dan program padat karya yang membantu menambah penghasilan masyarakat.

Namun demikian, masih terdapat sebagian masyarakat yang merasa belum merasakan manfaat langsung dari program-program tersebut.

Hasil wawancara tanggal 14 juni 2025 dengan informan pendukung (ML) selaku Tokoh Masyarakat setempat enguraikan bahwa :

*"Kalau saya lihat, pemerintah desa sudah cukup berupaya dalam memberikan dukungan kepada masyarakat, terutama dalam bentuk bantuan sosial, program pemberdayaan, dan pelatihan-pelatihan. Misalnya, ada bantuan alat kerja bagi petani dan nelayan, serta bantuan modal kecil untuk pelaku usaha mikro. Tapi dari segi moral, memang masih perlu ditingkatkan. Pemerintah belum terlalu sering turun langsung membangun komunikasi dua arah dengan warga, padahal itu penting supaya masyarakat merasa diperhatikan dan termotivasi. Masyarakat berharap ada insentif nyata yang bisa membantu mereka lebih produktif, seperti bantuan modal usaha tanpa bunga, pelatihan keterampilan yang sesuai dengan potensi desa, dan kemudahan dalam memasarkan produk lokal".*

Berdasarkan hasil wawancara Bersama informan pendukung diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa telah berupaya memberikan dukungan kepada masyarakat melalui bantuan sosial, program pemberdayaan, serta pelatihan. Beberapa bentuk bantuan yang diberikan antara lain alat kerja bagi petani dan nelayan serta modal usaha untuk pelaku UMKM. Namun, dukungan secara moral dinilai masih kurang, karena komunikasi langsung dan keterlibatan pemerintah desa dengan masyarakat belum optimal. Masyarakat berharap adanya insentif yang lebih nyata, seperti modal usaha tanpa bunga, pelatihan berbasis potensi lokal, dan dukungan pemasaran produk agar lebih produktif dan sejahtera.

Hasil wawancara tanggal 14 juni 2025 dengan informan pendukung (ARS) selaku Ketua Karang Taruna setempat menguraikan bahwa :

*"Dari saya menanggapi bahwa Pemerintah desa sejauh ini sudah cukup aktif memberikan dukungan, walaupun masih terbatas. Dari segi moral, mereka sering hadir dalam kegiatan masyarakat seperti pelatihan, rapat pemuda, atau gotong royong. Kehadiran mereka memberikan semangat tersendiri bagi kami. Namun, dari segi material, dukungan masih minim. Misalnya, pelatihan kewirausahaan atau bantuan alat usaha hanya diberikan ke beberapa kelompok saja dan belum merata. Kami di Karang Taruna masih sering swadaya dalam menjalankan kegiatan produktif karena anggaran dari desa masih belum maksimal. Yang paling diharapkan masyarakat itu bantuan yang sifatnya langsung mendukung usaha, seperti alat produksi, bibit, atau modal usaha kecil".*

Berdasarkan hasil wawancara Bersama informan pendukung diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa telah cukup aktif memberikan dukungan kepada masyarakat, meskipun masih dalam cakupan yang terbatas. Dari sisi moral, pemerintah desa dinilai cukup sering hadir dalam kegiatan masyarakat, seperti pelatihan, rapat pemuda, maupun gotong royong. Kehadiran tersebut memberikan dorongan semangat dan rasa diperhatikan bagi warga. Namun, dari sisi dukungan material, masih dirasakan kurang merata. Pelatihan kewirausahaan dan bantuan alat usaha misalnya, hanya diberikan kepada kelompok tertentu dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk pemuda. Karang Taruna sendiri masih banyak mengandalkan swadaya dalam menjalankan kegiatan produktif karena alokasi anggaran dari desa belum maksimal. Oleh karena itu, masyarakat, khususnya generasi muda, sangat mengharapkan bantuan langsung yang dapat mendukung kegiatan usaha, seperti alat produksi, bibit, dan modal usaha kecil yang menyentuh kebutuhan riil mereka.

Hasil wawancara tanggal 14 juni 2025 dengan informan pendukung (Z) selaku Masyarakat setempat menguraikan bahwa :

*"Saya beranggapan bahwa pemerintah desa sudah berusaha memberikan dukungan, tapi masih belum merata. Ada bantuan seperti BLT Dana Desa atau program pemberdayaan, tapi tidak semua warga bisa menikmati. Dukungan moral seperti sosialisasi atau pengarahan juga ada, tapi jarang dan kurang mendalam. Kadang masyarakat bingung karena informasi yang diberikan tidak terlalu jelas. Jadi bisa dibilang, dukungan ada, tapi masih perlu ditingkatkan lagi supaya benar-benar bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, terutama yang betul-betul membutuhkan".*

Berdasarkan hasil wawancara Bersama informan pendukung diatas dapat disimpulkan bahwa dukungan dari pemerintah desa memang ada, namun belum merata dan kurang optimal. Bantuan seperti BLT dan program pemberdayaan tidak dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, sementara dukungan moral seperti sosialisasi atau pengarahan masih bersifat terbatas dan kurang komunikatif. Minimnya kejelasan informasi menyebabkan sebagian warga merasa bingung dan tidak terlibat secara aktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme penyaluran bantuan dan penyampaian informasi perlu ditingkatkan, agar dukungan yang diberikan benar-benar menyentuh kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan diatas, maka peneliti dapata menarik kesimpulan bahwa pemerintah desa telah melakukan berbagai upaya dalam memberikan motivasi dan dukungan kepada masyarakat, baik secara moral maupun material. Program yang dilaksanakan meliputi penyuluhan, pelatihan keterampilan, bantuan alat pertanian dan perikanan, bantuan sosial seperti BLT, serta dukungan bagi pelaku UMKM dan program padat karya. Namun, hasil di lapangan menunjukkan masih adanya kesenjangan antara upaya pemerintah desa dan pemahaman atau partisipasi masyarakat. Sebagian besar warga belum sepenuhnya merasakan manfaat dari program-program yang ada, baik karena distribusi yang belum merata, minimnya komunikasi dua arah, maupun kurangnya pendampingan berkelanjutan.

Masyarakat cenderung lebih mengharapkan bantuan yang bersifat langsung, seperti modal usaha tanpa bunga, alat produksi, atau pelatihan berbasis potensi lokal yang disertai pendampingan intensif. Selain itu, masih terdapat masalah dalam efektivitas komunikasi dan transparansi informasi, yang menyebabkan sebagian warga tidak mengetahui atau tidak memahami program yang sedang dijalankan. Akibatnya, tingkat keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masih rendah, dan program tidak berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam strategi motivasi, mekanisme penyaluran bantuan, serta peningkatan komunikasi dan keterlibatan masyarakat agar tujuan pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan benar-benar tercapai secara menyeluruh.

### **Komunikasi**

Berikut hasil wawancara tanggal 14 juni 2025 dengan informan kunci (ASS) selaku kepala desa, mengatakan bahwa :

*"Secara umum, komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat sudah berjalan cukup baik. Kami selalu berusaha terbuka dan menyampaikan program-program kesejahteraan melalui berbagai cara, seperti pengumuman di balai desa, pertemuan RT/RW, dan juga lewat media sosial desa. Namun memang, tantangan yang sering kami hadapi adalah belum semua masyarakat aktif mengikuti informasi. Tapi kami*

*terus berupaya agar setiap program yang dijalankan diketahui dan dipahami masyarakat. Kami rutin melakukan musyawarah desa minimal tiga kali dalam setahun, terutama menjelang penyusunan RKPDes dan pelaksanaan program Dana Desa”.*

Berdasarkan hasil wawancara bersama informan kunci diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi dengan masyarakat sudah cukup baik. Informasi tentang program desa disampaikan melalui pengumuman di balai desa, pertemuan RT/RW, dan media sosial. Namun, masih ada warga yang kurang aktif mengikuti informasi, sehingga belum semua masyarakat mengetahui program yang dijalankan. Untuk mengatasinya, pemerintah desa terus berusaha meningkatkan penyampaian informasi dan rutin mengadakan musyawarah desa setidaknya tiga kali dalam setahun, terutama saat menyusun RKPDes dan menjalankan program Dana Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, kemudian peneliti mendalami informan dengan hasil wawancara pada tanggal 14 juni 2025 dengan informan (FSS) selaku Sekertaris Desa, mengatakan bahwa:

*“Kalau berbicara persoalan komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat cukup baik. Kami berusaha transparan dalam menyampaikan setiap program yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan, seperti bantuan sosial, program ketahanan pangan, atau pelatihan keterampilan. Biasanya kami menggunakan pengumuman langsung melalui kepala dusun, grup WhatsApp desa, serta papan informasi desa. Namun, kami juga menyadari masih ada sebagian warga yang belum terjangkau informasi secara maksimal, terutama yang tinggal di wilayah pelosok. Musyawarah desa biasanya kami adakan minimal satu kali dalam tiga bulan atau saat akan menjalankan program penting. Misalnya, menjelang penyusunan RKPDes atau saat ada bantuan dari pemerintah pusat atau kabupaten”.*

Berdasarkan hasil wawancara Bersama informan pendukung diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi dengan masyarakat sudah berjalan cukup baik dan transparan, khususnya dalam menyampaikan program-program yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan, seperti bantuan sosial, ketahanan pangan, dan pelatihan keterampilan. Informasi biasanya disampaikan melalui kepala dusun, grup WhatsApp desa, dan papan pengumuman. Meskipun demikian, masih ada sebagian warga, terutama yang tinggal di wilayah pelosok, yang belum sepenuhnya terjangkau informasi. Untuk menjaga partisipasi dan keterlibatan masyarakat, pemerintah desa rutin mengadakan musyawarah desa minimal satu kali setiap tiga bulan atau ketika ada program penting, seperti penyusunan RKPDes maupun penyaluran bantuan dari pemerintah pusat atau daerah.

Berdasarkan dengan pendapat diatas berkaitan dengan komunikasi, informan lainnya memberikan pendapatnya pada hasil wawancara tanggal 14 juni 2025 dengan informan pendukung (AH) selaku Ketua BPD, mengutarakan bahwa :

*“Kalau dari saya selaku BPD, komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat itu sebenarnya sudah cukup baik. Biasanya informasi tentang program-program kesejahteraan disampaikan lewat kepala dusun atau pas ada kegiatan desa, misalnya gotong royong atau pengajian. Tapi memang belum semua masyarakat bisa menerima informasi itu secara merata. Masih ada juga yang bilang nggak tahu atau telat tahu, mungkin karena keterbatasan media informasi yang digunakan. Di sini, menurut saya peran tokoh masyarakat dan BPD itu penting, supaya informasi bisa lebih luas lagi jangkauannya. Musyawarah desa biasanya kami laksanakan saat penyusunan RKPDes atau ketika ada program baru yang mau dijalankan, minimal*

*dua kali dalam setahun secara resmi. Tapi untuk sosialisasi yang sifatnya lebih teknis, seperti pelatihan keterampilan atau bantuan usaha, itu masih kurang sering. Kadang informasinya cuma sampai ke kelompok tertentu aja”.*

Berdasarkan hasil wawancara Bersama informan pendukung diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat dinilai sudah berjalan cukup baik. Informasi mengenai program-program kesejahteraan umumnya disampaikan melalui kepala dusun atau disampaikan saat kegiatan desa seperti gotong royong dan pengajian. Namun demikian, penyampaian informasi belum merata karena masih ada warga yang merasa tidak mengetahui atau terlambat mendapatkan informasi, yang kemungkinan disebabkan oleh keterbatasan media atau sarana komunikasi yang digunakan. Dalam hal ini, tokoh masyarakat dan BPD memiliki peran penting sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat agar informasi dapat menjangkau seluruh warga secara lebih luas.

Hasil wawancara tanggal 14 Juni 2025 dengan informan pendukung (ML) selaku Tokoh Masyarakat setempat menguraikan bahwa :

*“Kalau persoalan komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat sudah berjalan, tapi belum maksimal. Memang kadang ada penyampaian program melalui kepala dusun atau lewat pengumuman masjid, tapi tidak semua warga paham isinya. Kadang informasinya datang mendadak, jadi masyarakat tidak siap. Sosialisasi dan musyawarah memang dilakukan, biasanya setahun dua sampai tiga kali, misalnya saat penyusunan RKPDes atau laporan pertanggungjawaban. Tapi kalau ditanya efektivitasnya, saya rasa masih kurang. Banyak warga yang hadir tapi tidak berani bicara atau tidak tahu apa yang bisa mereka usulkan. Kadang juga musyawarah cuma formalitas”.*

Berdasarkan hasil wawancara Bersama informan pendukung diatas dapat disimpulkan bahwa Komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat memang sudah ada, tapi belum berjalan maksimal. Informasi program biasanya disampaikan lewat kepala dusun atau pengumuman masjid, tapi sering mendadak dan kurang jelas, sehingga banyak warga yang tidak paham. Musyawarah desa biasanya dilakukan dua sampai tiga kali setahun, seperti saat penyusunan RKPDes. Namun, efektivitasnya masih kurang karena banyak warga yang hanya datang tanpa berani menyampaikan pendapat, bahkan tidak tahu apa yang bisa mereka usulkan. Akibatnya, musyawarah cenderung jadi formalitas saja.

Hasil wawancara tanggal 14 juni 2025 dengan informan pendukung (ARS) selaku Ketua Karang Taruna setempat menguraikan bahwa :

*“Kalau dari kami di Karang Taruna, sebenarnya komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat itu sudah berjalan, tapi masih terkesan satu arah. Maksudnya, memang pemerintah desa sering umumkan program-program lewat kepala dusun atau lewat pengeras suara di masjid, tapi penjelasannya belum selalu lengkap. Kadang warga nggak tahu detailnya, kayak siapa aja yang bisa ikut, atau apa saja syaratnya. Jadi komunikasi itu ada, tapi belum optimal. Harusnya bisa lebih terbuka dan melibatkan semua kalangan, termasuk kami dari Karang Taruna. Kalau soal musyawarah desa, biasanya dilakukan beberapa kali dalam setahun, terutama pas mau susun RKPDes atau kalau ada program bantuan dari kabupaten. Tapi terus terang, pelaksanaannya masih belum terlalu efektif. Banyak warga yang datang cuma duduk dengar, nggak ikut diskusi. Sosialisasi juga kadang cuma sampai ke tokoh-tokoh tertentu, jadi nggak merata”.*

Berdasarkan hasil wawancara Bersama informan pendukung diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi pemerintah desa dengan masyarakat sudah berjalan, tapi masih satu arah dan kurang jelas. Informasi program sering disampaikan tanpa detail, sehingga banyak warga tidak paham isinya. Musyawarah desa dilakukan beberapa kali setahun, tapi partisipasi masyarakat masih rendah dan sosialisasi belum merata, karena hanya menyasar tokoh tertentu.

Hasil wawancara tanggal 14 Juni 2025 dengan informan pendukung (Y) selaku Masyarakat setempat menguraikan bahwa:

*"Kalau menurut saya, komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat masih kurang maksimal. Informasi biasanya disampaikan lewat kepala dusun atau pengumuman masjid, tapi nggak semua warga langsung tahu atau paham isi programnya. Kadang malah baru tahu setelah programnya jalan. Harusnya komunikasinya lebih jelas dan terbuka, misalnya lewat pertemuan langsung. Sosialisasi atau musyawarah desa memang ada, tapi nggak rutin. Biasanya cuma pas ada kegiatan besar, kayak pembagian bantuan atau pembangunan. Padahal kalau bisa musyawarah itu lebih sering, biar masyarakat tahu peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan, kayak pelatihan atau bantuan usaha. Soalnya kadang warga punya ide, tapi bingung mau disampaikan ke siapa karena kurang forum buat diskusi langsung sama pemerintah desa".*

Berdasarkan hasil wawancara Bersama informan pendukung diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi pemerintah desa masih kurang maksimal. Informasi program sering disampaikan lewat kepala dusun atau pengumuman masjid, namun tidak semua warga langsung memahami atau mengetahuinya. Sosialisasi dan musyawarah desa tidak rutin dan hanya dilakukan saat ada kegiatan besar. Akibatnya, banyak ide atau masukan dari masyarakat yang tidak tersalurkan karena kurangnya forum diskusi langsung dengan pemerintah desa.

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan diatas, maka peneliti dapata menarik kesimpulan bahwa komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat di Desa Dolong A telah berjalan namun belum optimal. Pemerintah desa dinilai sudah berusaha menyampaikan informasi program-program desa melalui berbagai saluran, seperti kepala dusun, pengumuman masjid, papan informasi, media sosial, serta forum-forum seperti musyawarah desa. Namun, penyampaian informasi masih belum merata dan sering kali kurang jelas, sehingga tidak semua warga memahami isi dan tujuan program dengan baik. Musyawarah desa memang rutin dilaksanakan, terutama saat penyusunan RKPDDes atau pelaksanaan program besar. Namun efektivitasnya dinilai masih rendah karena partisipasi aktif masyarakat minim—banyak warga hanya hadir tanpa memberikan pendapat atau usulan. Selain itu, sosialisasi teknis atau informasi penting masih sering hanya menjangkau tokoh-tokoh tertentu dan belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat, termasuk pemuda dan kelompok pelosok.

## **PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak terkait, peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Dolong A dapat dilihat melalui tiga aspek utama, yaitu pemberdayaan masyarakat, motivasi, dan komunikasi.

Dalam konteks pemberdayaan, pemerintah desa telah melaksanakan sejumlah program seperti pelatihan keterampilan, bantuan alat pertanian dan perikanan, dukungan terhadap pelaku UMKM, serta program padat karya. Upaya ini sejalan dengan teori pemberdayaan masyarakat (*community empowerment theory*) yang dikemukakan

oleh (Muslih, 2021), di mana pemberdayaan bertujuan meningkatkan kontrol masyarakat terhadap keputusan dan sumber daya yang memengaruhi kehidupannya. Namun, dalam praktiknya, hasil menunjukkan bahwa pemberdayaan belum sepenuhnya merata, karena masih terdapat kelompok masyarakat yang belum tersentuh oleh program tersebut. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa prinsip partisipatif dalam teori pemberdayaan belum berjalan secara maksimal, di mana masyarakat seharusnya dilibatkan sejak perencanaan hingga pelaksanaan program.

Upaya pemerintah desa dalam memberikan motivasi berupa dukungan moral melalui penyuluhan dan pendekatan sosial, serta dukungan material seperti bantuan langsung tunai dan modal usaha, menunjukkan adanya upaya membangkitkan semangat masyarakat untuk berkembang. Ini berkaitan dengan teori motivasi dua faktor dari (Wedadjati, 2023), yang membedakan antara faktor motivator (seperti pengakuan dan pencapaian) dan faktor hygiene (seperti kondisi kerja atau bantuan ekonomi). Namun demikian, temuan menunjukkan bahwa masyarakat lebih tertarik pada bantuan yang bersifat langsung, seperti modal usaha tanpa bunga atau bantuan alat, dan kurang merespons program yang membutuhkan proses pembinaan jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwa faktor motivator belum sepenuhnya diperkuat, sehingga motivasi masyarakat masih bersifat jangka pendek dan instan.

Dalam aspek komunikasi, pemerintah desa telah melakukan penyebaran informasi melalui kepala dusun, pengumuman masjid, media sosial, hingga forum musyawarah desa. Meskipun berbagai media telah dimanfaatkan, komunikasi dinilai belum berjalan efektif karena masih banyak warga yang tidak menerima informasi secara utuh atau bahkan tidak tahu adanya program yang sedang dijalankan. Situasi ini sesuai dengan teori komunikasi dua arah (*two-way communication*) yang dikemukakan oleh (Martha et al., 2024), yang menyatakan bahwa komunikasi yang efektif harus melibatkan umpan balik dari penerima pesan. Dalam kasus Desa Dolong A, kurangnya umpan balik dari masyarakat dan rendahnya partisipasi aktif menunjukkan bahwa komunikasi masih bersifat satu arah, sehingga informasi tidak sepenuhnya terserap oleh masyarakat.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka, dapat ditarik kesimpulannya yaitu:

1. Pemerintah desa telah melaksanakan program pemberdayaan berupa pelatihan, bantuan alat, dan pendampingan untuk petani, nelayan, dan UMKM. Namun, distribusi belum merata dan pendampingan berkelanjutan lemah indikasi bahwa prinsip partisipatif dalam teori pemberdayaan masyarakat belum diadopsi secara efektif.
2. Dukungan moral dan material yang tersedia cenderung bersifat 'hygiene' dapat mencegah ketidakpuasan, tapi kurang mampu memicu motivasi mendalam. Masyarakat mengharapkan motivator seperti pengakuan, penghargaan, dan pelatihan berbasis potensi lokal supaya muncul semangat kemandirian serta komitmen jangka panjang.
3. Informasi program desa disampaikan melalui berbagai kanal kepala dusun, pengumuman, kelompok media social namun belum menjangkau seluruh warga dan masih bersifat satu arah tanpa umpan balik aktif. Hal ini sejalan dengan teori komunikasi dua arah; ketika komunikasi minim, partisipasi dan pemahaman warga juga rendah.

4. Secara keseluruhan, peran Pemerintah Desa Dolong A dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menunjukkan bahwa pelaksanaan program tersebut belum sepenuhnya efektif karena masih lemahnya prinsip partisipatif, distribusi bantuan yang belum merata, dan minimnya pendampingan berkelanjutan. Selain itu, program desa belum mampu membangkitkan motivasi masyarakat secara optimal, ditandai dengan rendahnya inisiatif dan keterlibatan aktif warga dalam kegiatan pemberdayaan. Faktor lain yang memperburuk kondisi ini adalah komunikasi yang belum berjalan dua arah, karena informasi masih disampaikan secara top-down tanpa ruang dialog yang memadai, sehingga berdampak pada rendahnya pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap program yang dijalankan pemerintah desa.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, adapun saran yang dapat penulis tawarkan diantaranya sebagai berikut :

1. Libatkan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi program, terutama kelompok yang sebelumnya terabaikan serta Bentuk forum pendampingan berkelanjutan untuk meningkatkan rasa memiliki dan keberlanjutan program.
2. Berikan pengakuan formal seperti sertifikat dan penghargaan UMKM atau pelaku usaha berprestasi serta Kembangkan pelatihan yang bersifat berkelanjutan dan relevan dengan potensi lokal, serta upayakan pelibatan orang-orang berprestasi sebagai mentor.
3. Tingkatkan frekuensi musyawarah desa dan sosialisasi teknis di berbagai lokasi, termasuk wilayah pelosok serta Libatkan tokoh masyarakat, Karang Taruna, dan BPD sebagai jembatan komunikasi aktif, memastikan informasi tersampaikan, dipahami, dan ditindaklanjuti oleh warga.
4. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemerintah desa perlu memperhatikan dan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, memberikan motivasi kepada masyarakat dan melakukan komunikasi bersama masyarakat dalam melaksanakan program desa khususnya peningkatan kesejahteraan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alfianto, F. Y., & Fauzi, A. M. (2021). Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Desa Wisata Pakuncen. *E-Journal Unesa*, 1–16.
- Alhababy, A. M. (2016). *Bab II Masyarakat Dan Pesantren* (Vol. 14, Issue 5).
- Amran Sahputra Tanjung, Anggi Martuah Purba, & Mahadir Muhammad. (2022). Pemahaman terhadap Teori-Teori Organisasi. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(2685-936X), 5816–5823.
- Apriansyah, N. (2016). Peran Pemerintahan dalam Pembentukan Kebijakan Hukum. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 10(2), 187–196.
- Arzat Lamber, Lisbeth Lesawengen, E. K. (2022). Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 2(2337–4004).
- Cahyaningtyas, F. (2022). Peran Moderasi *Corporate Sosial Responsibility* Terhadap Nilai Perusahaan: Perspektif Teori Sinyal. *MDP Student Conference (MSC)*, 202 2, 153–159.

- Dimas Ilham Nur Wicaksana. (2022). *Optimalisasi Kinerja Organisasi Pemerintah Melalui Mekanisme Rekrutmen Pegawai Berbasis Kompetensi Fungsional*. Kanwil Kementerian Hukum RI Daerah Istimewa Yogyakarta.1(5),1-6.
- Dr. Purwowibowo, M.Si. & Kris Hendijanto, S.Sos., M. S. (2019). Perkembangan Konsep Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial Profesional Di Era Global. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.
- Engkus, E. (2017). Administrasi Publik Dalam Perspektif Ekologi. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 7(1), 91–101.
- Herminingsih, H., Askar, A., & . (2022). Peran Teori Belajar Deskriptif Dan Preskriptif Dalam Pendidikan. *Kajian Islam*, 1, 73–78.
- Hidayati, B. M. R., & Fadhilah, T. N. (2021). Religiusitas dan Kesejahteraan Psikologis Mahasiswa Fakultas Dakwah. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 2(3), 197–210.
- Husin, I. (2020). Teori Organisasi. *Jurnal Gerbang Stimik Bani Saleh*, 12, 56–65.
- Ilham, A. R. (2018). *Analisis Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya*. 14–48.
- Ilwan, I., & Mesiono, M. (2022). Kepemimpinan Organisatoris Sebagai Sharing Power dalam Mewujudkan Keseimbangan Hubungan Atasan dan Bawahan Pada MTsN 10 Bireven. *Pionir: Jurnal Pendidikan*, 10(2339–2495), 40–50.
- Kurniawan, A. (2017). *Organisasi Pemerintahan*. Scribd. <https://id.scribd.com/document/348410955/Pengertian-Organisasi-Pemerintahan>. 1(2) 1-12.
- Kuswandi, D. (2016). Model Pembelajaran IPS yang Menggunakan Unsur-Unsur Penting Kehidupan Nyata Masyarakat Sebagai Sumber Belajar. *Edcomtech*, 1, 49–58.
- Lusya, S., Gorahe, V., Waani, F., & Tasik, F. (2021). Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa. *Eksekutif*, 1, 1–9.
- Mario Juan C.S. Hidete Arie, J. R. N. R. A. P. (2022). Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Mawea Kecamatan Tobelo Timur Kabupaten Halmahera Utara Mario. *Jap*, VIII(113), 12–20.
- Martha, A., Suri, A., Putri, Y. R., Sari, Y. N., Studi, P., Dasar, P., & Adzkia, U. (2024). Pengertian Komunikasi , Komunikasi Antarbudaya dan Sistem Komunikasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8, 50356–50365.
- Mayangsari, A. S. (2017). Kajian Kesejahteraan Masyarakat. In *Fkip Ump*. 1-18.
- mince, yare. (2021). *Peran Ganda Perempuan Pedagang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor*. 3(2), 17–28.
- Mulia, R. A., & Saputra, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kota Padang. *Jurnal EL-RİYASAH*, 11(1), 67.
- Muslih. (2021). Efektifitas pelayanan kesehatan masyarakat di UPD kesehatan puskesmas kopah kecamatan kuantan tengah kabupaten kuantan singingi. *Juhanperak*, 1 Nomor 2, 537–544.
- Nafisatur, M. (2024). Metode Pengumpulan Data Penelitian. *Metode Pengumpulan Data Penelitian*, 3(5), 5423–5443.
- Nartin, N., & Musin, Y. (2022). Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dimasa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Kantor Camat Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan). *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(3), 163–172.
- Nilamsari, N. (2014). Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. *Wacana*, 8(2), 177–1828.

- Nugraha, B., Purnamaningsih, P. E., Wiwin, K., Wismayanti, D., Martiawan, R., Sumiati, I., Maesarini, I. W., Firdausijah, R. T., Kunda, A., Kusnadi, I. H., & Hendrayady, A. (2022). *Teori administrasi* (M. P. Diana Purnama Sari, S.E., M.E. Ari Yanto (ed.)). Pt Global Eksekutif Teknologi. *cetakan Pertama*, hal 20-50.
- Panjaitan, D. T. M. R., & Pardede, D. K. (2021). *Administrasi Publik. CV.Eureka Media Aksara, Cetakan Pertama*, hal 9.
- Pasolong. (2019). *Teori Admnistrasi Publik. Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(1), 1–22.
- Pramesti, M. W. (2018). *Dimensi - Dimensi Strategis Administrasi Publik dalam Islam. Politea*, 1(1), 37.
- Prasetyo, M. J. (2023). *Pemberlakuan Prinsip Kedaulatan Wilayah Menurut Hukum Internasional Sebagai Unsur Berdirinya Negara. Lex Administratum*, 11(1), 2.
- Putra Nayotama, T. A., & Mutaqi, A. S. (2023). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bidang Usaha Home Industry Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Jural Riset Rumpun Ilmu Teknik*, 2(1), 113–121.
- Rahmawan, A. B., & Cetera, K. (2020). *Kajian Teori Public Trust Doctrine Dalam Kasus Lingkungan: Studi Kasus UU Minerba Baru. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(1), 28–47.
- Rahmi Pertiwi, G., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). *Jenis Jenis Penelitian Ilmiah Kependidikan. Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1), 41–52.
- Reyza, A. M., Ode Husen, L., & Renaldy Bima, M. (2021). *Fungsi Pemerintah Dalam Melaksanakan Pelayanan Publik Di Masa Pandemi. Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 48–60.
- Roza, D., & S, G. T. P. (2019). *Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Indonesia. Jurnal Cendikia Hukum*, 5(1), 12.
- Rusmiati, E. T. (2023). *Strategi Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Masjid: Studi Pada Masjid-Masjid di Kota Tangerang Selatan. Jurnal Pustaka Dianmas*, 3(2), 73–80.
- Sabarudin, A. J. (2021). *Organisasi Manajemen dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam. Jurnal Al-Hikam*, 2, 1–16.
- Sadid Helni. (2013). *Peranan Pemerintah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Wasuponda Kabupaten Luwu Timur. Jurnal Multi*, 1–66.
- Saiful, N. A. Q. (2023). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Jeneponto. Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 2, 333–357.
- Saleh, S. (2017). *Penerbit Pustaka Ramadhan, Bandung. In Analisis Data Kualitatif* (Vol. 1, p. 180).
- Setiawan, F. (2019). *Pengaruh Teori Pembangunan Dunia Ke -3 Dalam Teori Modernisasi Terhadap Administrasi Pembangunan Di Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 8(2), 59–60.
- Sholahudin, U. (2020). *Selebrasi Pernikahan Artis Dalam Perspektif Teori Masyarakat Konsumsi Baudrillard. Journal of Urban Sociology*, 2(2), 57.
- Simanjuntak. (2016). *simbol dan makna yang terdapat pada Tradisi Wiwitan. Jakarta, Edisi Pertama. hal 1-20*.
- Sugiman. (2018). *Pemerintah Desa. Pemerintahan Desa, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma*, 7(1), 84–85.
- Sukmana, F. H., & Maryanti, S. (2023). *Teori Administrasi Henri Fayol: Gagasan, Kontribusi, Dan Batasannya. Politea : Jurnal Politik Islam*, 6(2), 44–66.

- Sultan, Rahayu, H. C., & Purwiyanta. (2023). Analisis Pengaruh Kesejahteraan Masyarakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 5, 75–83.
- Suprpto, A. R. S. (2023). *Kebijakan Publik Teori, Formulasi dan Aplikasi (Issue May)*. Edisi Cetaka Pertama, hal 20-27.
- Susanti, G. G. Z. H. B. Z. Q. A. R. A. D. S. (2017). *Makalah Organisasi Pemerintahan*. [https://www.academia.edu/20365439/](https://www.academia.edu/20365439/Makalah_Organisasi_Pemerintahan) Makalah \_ Organisasi\_Pemerintahan. hal 1-30.
- Tanto, H. T. (2013). Sistem Bawon Di Desa Mungseng Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung. *Eprints.Uny.Ac.Id*, 12–36.
- Usman, Y., Yusuf, N., Ayu, D., & Wuryandini, R. (2023). Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Teori Peran. *Jurnal Mirai Management*, 8(2), 41–47.
- Wahyudi, A. (2015). Konflik, Konsep Teori Dan Permasalahan. *Jurnal Publiciana*, 8(1), 1–15.
- Wedadjati, R. S. (2023). Evaluasi Kepuasan Karyawan Berbasis Herzberg's Two Factors Motivation Theory. *Jurnal Strategi Dan Bisnis*, 11(1), 13.
- Wolok, E., Lahay, I. H., Deddy, R., Dako, R., & Umara, A. M. (2024). *Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa masuru melalui pengelolaan sumber daya alam dan infrastruktur yang berkelanjutan*. Vol 3(2), 39–45.